

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT PP (Persero) Tbk



Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 26 April 2018**
Waktu : **Pukul 10.47 - 12.27 WIB**
Tempat : **PT PP (Persero) Tbk Plaza PP - Wisma Subiyanto Auditorium Lantai 1 Jl. Jend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta 13760**

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Oktavianus Dominggus AGNI/ Andi Gani Nena Wea	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Lukman Hidayat
Komisaris Independen	Aryanto Sutadi	Direktur Infrastruktur	M. Toha Fauzi
Komisaris	M. Khoerur Roziqin	Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia	Agus Purbianto
Komisaris	Sumardi	Direktur EPC & Kerjasama Luar Negeri	Abdul Haris Tatang
Komisaris	Wismana Adi Suryabrata	Direktur Gedung	M. Aprindy
Komisaris	Arie Setadi Moerwanto		

Dalam RUPS Tahunan telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 4.447.661.615 saham atau mewakili 71,74% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 6.199.987.354 Saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 6.199.987.353 Saham Seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 03 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diperoleh dari PT BSR Indonesia.

Tata Tertib RUPS Tahunan:

- RUPS Tahunan dipimpin oleh Bpk. Andi Gani Nena Wea selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
 - Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS Tahunan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara RUPS Tahunan yang dibicarakan;
 - Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan;
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan dan mengenai hal lain dengan lisan. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan. Suara absten diangap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Mata Acara RUPS Tahunan:**
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
 - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - Penetapan Tantien Tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018;
 - Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
 - Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya;
 - Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyerntaan Modal Negara (PMN) sampai dengan 31 Desember 2017;
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan *Rights Issue*;
 - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
 - Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan <i>Audited</i> untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Pertama	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan											
Pengambilan Keputusan Mata Acara Pertama	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>4.329.119.649 saham atau 97,33%</td><td>117.566.966 saham atau 2,64%</td><td>955.000 saham atau 0,02%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.566.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%
Dengan Pemungutan Suara												
Setuju	Abstain	Tidak Setuju										
4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.566.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%										
Keputusan Mata Acara Pertama	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GA118 0138 PTPP HA tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat " Wajar Dalam Semua Hal yang Material " serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang: 1. Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2. Tindakan tersebut telah tercatat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan Tahunan yang tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan Tahun Buku 2017.											

Mata Acara Kedua	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan <i>Audited</i> untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kedua	Tidak ada Pemegang Saham mengajukan pertanyaan											
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kedua	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>4.329.119.649 saham atau 97,33%</td><td>117.566.966 saham atau 2,64%</td><td>955.000 saham atau 0,02%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.566.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%
Dengan Pemungutan Suara												
Setuju	Abstain	Tidak Setuju										
4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.566.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%										
Keputusan Mata Acara Kedua	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a) Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sesuai laporannya Nomor: GA118 0262 PKBLPP HA tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat " Wajar Dalam Semua Hal yang Material " serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. b) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.											

Mata Acara Ketiga	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Ketiga	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketiga	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.332.307.098 saham atau 97,41%	112.117.517 saham atau 2,52%	3.237.000 saham atau 0,07%
	RUPS Tahunan dengan suara 99,93% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:		
	a. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.453.140.728.771,- (<i>satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah</i>) dengan komposisi sebagai berikut:		
	1. Sebesar 20% atau Rp 290.628.145.754,- (<i>dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah</i>) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp 148.222.628.708,- (<i>seratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan Rupiah</i>);		
Keputusan Mata Acara Ketiga	2. Sebesar 80% atau Rp 1.162.512.583.017,- (<i>satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas Rupiah</i>) ditetapkan sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.		
	b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembelian ke atas pembayaran dividen per saham.		

Mata Acara Keempat	Penetapan Tantien Tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Keempat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Keempat	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.316.185.998 saham atau 97,04%	115.658.517 saham atau 2,60%	15.817.100 saham atau 0,36%
Keputusan Mata Acara Keempat	RUPS Tahunan dengan suara 99,64% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantien bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018, dan b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantien bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018.		

Mata Acara Kelima	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kelima	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.											
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kelima	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>3.961.230.229 saham atau 89,06%</td><td>112.117.517 saham atau 2,52%</td><td>374.313.869 saham atau 8,42%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	3.961.230.229 saham atau 89,06%	112.117.517 saham atau 2,52%	374.313.869 saham atau 8,42%
Dengan Pemungutan Suara												
Setuju	Abstain	Tidak Setuju										
3.961.230.229 saham atau 89,06%	112.117.517 saham atau 2,52%	374.313.869 saham atau 8,42%										
Keputusan Mata Acara Kelima	RUPS Tahunan dengan suara 91,58% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan biaya jasa Akuntan Publik sebesar Rp 2.000.000.000,- (<i>dua miliar Rupiah</i>) tidak termasuk PPN dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE). Biaya OPE ditetapkan maksimal sebesar 5% dari biaya Jasa. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018.											

Mata Acara Keenam	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Keenam	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Keenam	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.332.607.770 saham atau 97,41%	114.098.945 saham atau 2,57%	955.000 saham atau 0,02%
Keputusan Mata Acara Keenam	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahan-perubahannya.		

Mata Acara Ketujuh	Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyerntaan Modal Negara (PMN) sampai dengan 31 Desember 2017											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Ketujuh	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan											
Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketujuh	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>4.334.589.098 saham atau 97,46%</td><td>112.117.517 saham atau 2,52%</td><td>955.000 saham atau 0,02%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	4.334.589.098 saham atau 97,46%	112.117.517 saham atau 2,52%	955.000 saham atau 0,02%
Dengan Pemungutan Suara												
Setuju	Abstain	Tidak Setuju										
4.334.589.098 saham atau 97,46%	112.117.517 saham atau 2,52%	955.000 saham atau 0,02%										
Keputusan Mata Acara Ketujuh	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan tambahan dana Penyerntaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 untuk periode Tahun Buku 2017.											

Mata Acara Kedelapan	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan <i>Rights Issue</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kedelapan	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Keputusan Mata Acara Kedelapan	Tidak ada pemungutan suara untuk Mata Acara Kedelapan. RUPS Tahunan menyampaikan bahwa Direksi Perseroan telah memberikan paparan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau <i>Rights Issue</i> .		

Mata Acara Kesembilan	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kesembilan	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		

Pengambilan Keputusan Mata Acara Kesembilan	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.273.430.313 saham atau 73,60%	323.971.795 saham atau 7,28%	850.259.507 saham atau 19,12%
Keputusan Mata Acara Kesembilan	RUPS Tahunan dengan suara 80,88% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas; c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		

Mata Acara Kesepuluh	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kesepuluh	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kesepuluh	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.245.558.699 saham atau 72,97%	372.208.141 saham atau 8,76%	829.894.775 saham atau 18,66%
Keputusan Mata Acara Kesepuluh	RUPS Tahunan dengan suara 81,34% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:		
	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Tumiya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 24 April 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan 1) Sdr. Lukman Hidayat dari semula Direktur Perencanaan dan Pengembangan menjadi Direktur Utama; 2) Sdr. M. Aprindy semula Direktur Gedung menjadi Direktur Perencanaan dan Pengembangan; dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat Sdr. Anton Satyo Hendriatmo sebagai Direktur Gedung Perseroan. Masa jabatan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memperhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT PP (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Anggota Direksi PT PP (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut : DEWAN DIREKSI Sdr. Lukman Hidayat selaku Direktur Utama Sdr. Abdul Haris Tatang selaku Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri Sdr. Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia Sdr. M. Aprindy selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Sdr. M. Toha Fauzi selaku Direktur Infrastruktur Sdr. Anton Satyo Hendriatmo selaku Direktur Gedung 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.		

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 46,876 (<i>Empat puluh enam koma delapan ratus tujuh puluh enam rupiah</i>) per saham dengan memperhatikan jumlah saham yang dikeluarkan dalam Perseroan.		
01.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	04 Mei 2018
02.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	09 Mei 2018
03.	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (<i>Recording Date</i>)	09 Mei 2018
04.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	25 Mei 2018
05.	Tanggal Distribusi Potongan Pajak Dividen	29 Juni 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada hari **Rabu, 09 Mei 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan hari **Rabu, 09 Mei 2018**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada hari **Jum'at, 25 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT BSR Indonesia di alamat Gedung High End lantai 3 J. Kebon Sirih 17 - 19 Jakarta, Telp. 021 - 80804722 paling lambat hari **Rabu, 09 Mei 2018** pukul **16.00 WIB**. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT BSR Indonesia paling lambat hari **Jum'at, 18 Mei 2018** (*5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen*). Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE PT BSR Indonesia mulai hari **Jum'at, 29 Juni 2018**.

Jakarta, 30 April 2018
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

PT PP (Persero) Tbk



Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : Pukul 10.47 – 12.27 WIB
Tempat : PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP – Wisma Subiyanto
Auditorium Lantai 1
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta 13160

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Oktavianus Domingus AGN/ Andi Gani Nena Wea	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Lukman Hidayat
Komisaris Independen	Aryanto Sutadi	Direktur Infrastruktur	M. Toha Fauzi
Komisaris	M. Khoerur Roziqin	Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia	Agus Purbianto
Komisaris	Sumardi	Direktur EPC & Kerjasama Luar Negeri	Abdul Haris Tatang
Komisaris	Wismana Adi Suryabrata	Direktur Gedung	M. Aprindy
Komisaris	Arie Setiadi Moerwanto		

Dalam RUPS Tahunan telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 4.447.651.615 saham atau mewakili 71,74% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 6.199.997.354 Saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 6.199.997.353 Saham Seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 03 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diperoleh dari PT BSR Indonesia.

Tata Tertib RUPS Tahunan:

- RUPS Tahunan dipimpin oleh Bpk. Andi Gani Nena Wea selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS Tahunan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara RUPS Tahunan yang dibicarakan;
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan;
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan dan mengenai hal lain dengan lisan. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan. Suara abstain dianggap mengulangi suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengulangi suara.

Mata Acara RUPS Tahunan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan Tantem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
- Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya;
- Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyerutan Modal Negara (PMN) sampai dengan 31 Desember 2017;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan *Rights Issue*;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan <i>Audited</i> untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Pertama	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Pertama	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.586.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%
Keputusan Mata Acara Pertama	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GA118 0138 PTTP HA tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat " Wajar Dalam Semua Hal yang Material " serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>vollegdy acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang: 1. Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2. Tindakan tersebut telah tercatat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan Tahunan yang tercemari dalam buku-buku Laporan Perseroan Tahun Buku 2017.		
Mata Acara Kedua	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan <i>Audited</i> untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kedua	Tidak ada Pemegang Saham mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kedua	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.329.119.649 saham atau 97,33%	117.586.966 saham atau 2,64%	955.000 saham atau 0,02%
Keputusan Mata Acara Kedua	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a) Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sesuai laporannya Nomor: GA118 0202 PKBLPP HA tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat " Wajar Dalam Semua Hal yang Material " serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>vollegdy acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercemari di dalam laporan tersebut. b) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.		

Mata Acara Ketiga	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Ketiga	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketiga	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.332.307.098 saham atau 97,41%	112.117.517 saham atau 2,52%	3.237.000 saham atau 0,07%
	RUPS Tahunan dengan suara 99,93% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:		
	a. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp 1.453.140.728.771,- (<i>satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah</i>) dengan komposisi sebagai berikut:		
Keputusan Mata Acara Ketiga	1. Sebesar 20% atau Rp 290.628.145.754,- (<i>dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah</i>) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp 148.222.628.708,- (<i>seratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan Rupiah</i>);		
	2. Sebesar 80% atau Rp 1.162.512.583.017,- (<i>satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas Rupiah</i>) ditetapkan sebagai Sediaan Laba yang belum ditentukan penggunaannya.		
	b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembelian ke atas pembayaran dividen per saham.		

Mata Acara Keempat	Penetapan Tantem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Keempat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Keempat	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.316.185.998 saham atau 97,04%	115.658.517 saham atau 2,60%	15.817.100 saham atau 0,36%
Keputusan Mata Acara Keempat	RUPS Tahunan dengan suara 99,64% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:		
	a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantem bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018, dan b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantem bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018.		

Mata Acara Kelima	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kelima	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kelima	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.961.230.229 saham atau 89,06%	112.117.517 saham atau 2,52%	374.313.869 saham atau 8,42%
Keputusan Mata Acara Kelima	RUPS Tahunan dengan suara 91,58% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan biaya jasa Akuntan Publik sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tidak termasuk PPN dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE). Biaya OPE ditetapkan maksimal sebesar 5% dari biaya Jasa. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018.		

Mata Acara Keenam	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Keenam	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Keenam	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.332.607.770 saham atau 97,41%	114.098.845 saham atau 2,57%	955.000 saham atau 0,02%
Keputusan Mata Acara Keenam	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahan-perubahannya.		

Mata Acara Ketujuh	Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyeritaan Modal Negara (PMN) sampai dengan 31 Desember 2017		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Ketujuh	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Ketujuh	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.334.589.098 saham atau 97,46%	112.117.517 saham atau 2,52%	955.000 saham atau 0,02%
Keputusan Mata Acara Ketujuh	RUPS Tahunan dengan suara 99,98% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan tambahan dana Penyeritaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 untuk periode Tahun Buku 2017.		

Mata Acara Kedelapan	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan <i>Rights Issue</i>
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kedelapan	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Keputusan Mata Acara Kedelapan	Tidak ada pemungutan suara untuk Mata Acara Kedelapan. RUPS Tahunan menyimpulkan bahwa Direksi Perseroan telah memberikan paparan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau <i>Rights Issue</i> .

Mata Acara Kesembilan	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kesembilan	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan											
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kesembilan	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>3.273.430.313 saham atau 73,60%</td><td>323.971.795 saham atau 7,28%</td><td>850.259.507 saham atau 19,12%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	3.273.430.313 saham atau 73,60%	323.971.795 saham atau 7,28%	850.259.507 saham atau 19,12%
Dengan Pemungutan Suara												
Setuju	Abstain	Tidak Setuju										
3.273.430.313 saham atau 73,60%	323.971.795 saham atau 7,28%	850.259.507 saham atau 19,12%										
Keputusan Mata Acara Kesembilan	RUPS Tahunan dengan suara 80,88% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas; c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicekualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.											

Mata Acara Kesepuluh	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan																				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kesepuluh	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan																				
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kesepuluh	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>3.245.558.699 saham atau 72,97%</td><td>372.208.141 saham atau 8,76%</td><td>829.894.775 saham atau 18,66%</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	3.245.558.699 saham atau 72,97%	372.208.141 saham atau 8,76%	829.894.775 saham atau 18,66%									
Dengan Pemungutan Suara																					
Setuju	Abstain	Tidak Setuju																			
3.245.558.699 saham atau 72,97%	372.208.141 saham atau 8,76%	829.894.775 saham atau 18,66%																			
Keputusan Mata Acara Kesepuluh	RUPS Tahunan dengan suara 81,34% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Tumiyana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 24 April 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan 1) Sdr. Lukman Hidayat dari semula Direktur Perencanaan dan Pengembangan menjadi Direktur Utama; 2) Sdr. M. Aprindy semula Direktur Gedung menjadi Direktur Perencanaan dan Pengembangan; dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat Sdr. Anton Satyo Hendriatmo sebagai Direktur Gedung Perseroan. Masa jabatan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT PP (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Anggota Direksi PT PP (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut: DEWAN DIREKSI <table><tr><td>Sdr. Lukman Hidayat</td><td>selaku</td><td>Direktur Utama</td></tr><tr><td>Sdr. Abdul Haris Tatang</td><td>selaku</td><td>Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri</td></tr><tr><td>Sdr. Agus Purbianto</td><td>selaku</td><td>Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia</td></tr><tr><td>Sdr. M. Aprindy</td><td>selaku</td><td>Direktur Perencanaan dan Pengembangan</td></tr><tr><td>Sdr. M. Toha Fauzi</td><td>selaku</td><td>Direktur Infrastruktur</td></tr><tr><td>Sdr. Anton Satyo Hendriatmo</td><td>selaku</td><td>Direktur Gedung</td></tr></table> 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.			Sdr. Lukman Hidayat	selaku	Direktur Utama	Sdr. Abdul Haris Tatang	selaku	Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri	Sdr. Agus Purbianto	selaku	Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia	Sdr. M. Aprindy	selaku	Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Sdr. M. Toha Fauzi	selaku	Direktur Infrastruktur	Sdr. Anton Satyo Hendriatmo	selaku	Direktur Gedung
	Sdr. Lukman Hidayat	selaku	Direktur Utama																		
Sdr. Abdul Haris Tatang	selaku	Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri																			
Sdr. Agus Purbianto	selaku	Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia																			
Sdr. M. Aprindy	selaku	Direktur Perencanaan dan Pengembangan																			
Sdr. M. Toha Fauzi	selaku	Direktur Infrastruktur																			
Sdr. Anton Satyo Hendriatmo	selaku	Direktur Gedung																			

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 46,876 (<i>Empat puluh enam koma delapan ratus tujuh puluh enam rupiah</i>) per saham dengan memperhatikan jumlah saham yang dikeluarkan dalam Perseroan.		
01.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	04 Mei 2018 09 Mei 2018
02.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	07 Mei 2018 11 Mei 2018
03.	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (<i>Recording Date</i>)	09 Mei 2018
04.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	25 Mei 2018
05.	Tanggal Distribusi Pemotongan Pajak Dividen	29 Juni 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada hari **Rabu, 09 Mei 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan hari **Rabu, 09 Mei 2018**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada hari **Jum'at, 25 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT BSR Indonesia di alamat Gedung High End lantai 3 J.L. Kebon Sirih 17 - 19 Jakarta, Telp: 021 - 80864722 paling lambat hari **Rabu, 09 Mei 2018 pukul 16.00 WIB**. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT BSR Indonesia paling lambat hari **Jum'at, 18 Mei 2018 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen)**. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE PT BSR Indonesia mulai hari **Jum'at, 29 Juni 2018**.

Jakarta, 30 April 2018
PT PP (Persero) Tbk
Direksi